

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan, peneliti akan menguraikan temuan dan hasil dari penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini didasarkan pada data yang telah dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pembahasan dalam bab ini akan memaparkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan informan yang relevan untuk penelitian.

Peneliti akan secara sistematis menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Temuan dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi akan dipaparkan secara rinci dan dijelaskan dengan menggunakan analisis yang relevan dan logis. Peneliti akan menghubungkan temuan dengan teori-teori yang telah ada untuk memperkuat kesimpulan yang dihasilkan.

Selain itu, pembahasan dalam bab ini juga akan melibatkan diskusi terfokus tentang masalah yang diteliti. Peneliti akan menganalisis temuan secara mendalam dan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, atau kebijakan yang relevan dalam interpretasi hasil penelitian. Diskusi ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implikasi temuan penelitian dan relevansinya terhadap teori yang ada atau konteks praktis.

Bab hasil penelitian dan pembahasan ini menjadi ruang bagi peneliti untuk mengungkapkan secara rinci dan sistematis temuan penelitian. Pembahasan yang kritis dan mendalam akan memberikan wawasan baru, pemahaman yang lebih baik, dan kontribusi yang signifikan terhadap pengetahuan yang ada dalam bidang yang diteliti.

Pada akhir bab ini, peneliti juga dapat menyimpulkan temuan penelitian, merumuskan implikasi dan saran berdasarkan hasil penelitian, serta mengidentifikasi kelemahan atau batasan dalam penelitian yang dapat menjadi saran untuk penelitian masa depan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan memahami konteks sosial, budaya, dan subjektivitas yang terkait dengan fenomena tersebut. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam karakteristik, proses, atau hubungan yang terjadi dalam konteks penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, berbagai metode penelitian digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Metode yang umumnya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan pemahaman dari para informan yang terlibat dalam penelitian. Pengamatan digunakan untuk mengamati secara langsung situasi atau perilaku yang terjadi

dalam konteks penelitian. Pemanfaatan dokumen melibatkan analisis terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti terlibat secara aktif dalam pengumpulan dan analisis data, serta berinteraksi dengan para informan atau partisipan penelitian. Pendekatan kualitatif memberikan kebebasan dalam menggali pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti, serta memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konteks dan kompleksitas yang terlibat dalam fenomena tersebut.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan kontekstual tentang topik penelitian, serta menghasilkan pemahaman dan temuan yang dapat berkontribusi terhadap pengetahuan yang ada dalam bidang tersebut.

Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan proses atau peristiwa yang sedang berlaku pada saat ini di lapangan yang di jadikan objek penelitian, kemudian data atau informasinya di analisis sehingga di peroleh suatu pemecahan masalah.

Untuk tahap analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data, dan melakukan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Untuk dapat mengetahui partai politik dalam perspektif regulasi dan implementasi keterwakilan perempuan. Pertama, peneliti melakukan observasi terlebih dahulu pada

tempat peneliti melakukan penelitian yakni pada partai politik PKB, PDI-P dan GOLKAR. Selanjutnya peneliti menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara atau dapat disebut juga sebagai pedoman wawancara sesuai dengan tujuan penelitian agar permasalahan penelitian ini dapat terjawab.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan cara bertahap dalam rentang pada bulan Maret-Mei 2023 Hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara yang mendalam dengan narasumber sebagai bentuk pencarian data.

Tabel jadwal wawancara

No	Nama Informan	Partai	Tanggal Wawancara
1	Abdul Mujib	PKB	18-05-2023
2	Titin Andriani	PDI-P	20-05-2023
3	Masda amelia putri	GOLKAR	03- 03-2023
4	Farina churun inin	GOLKAR	15-03-2023

## A. Hasil Penelitian

### a. Gambaran Objek Penelitian

#### i) Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Probolinggo

DPRD Kota Probolinggo memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di tingkat kota. Sebagai badan legislatif, DPRD Kota Probolinggo bertanggung jawab dalam mengawasi, mengendalikan, dan membahas rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku di kota tersebut. DPRD Kota Probolinggo juga memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya dan bertanggung jawab memastikan kebijakan pemerintah kota sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Selain itu, DPRD Kota Probolinggo memiliki peran penting dalam proses penganggaran kota. Mereka terlibat dalam penggunaan anggaran daerah dan memastikan bahwa penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. DPRD Kota Probolinggo juga dapat menerima pengaduan dari masyarakat terkait permasalahan yang timbul di kota, seperti tata ruang, lingkungan, dan sosial.

Dalam menjalankan tugasnya, DPRD Kota Probolinggo bekerja sama dengan pemerintah kota dan masyarakat untuk membangun kota yang lebih baik. Mereka berperan sebagai wakil rakyat yang melakukan kegiatan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. DPRD Kota Probolinggo juga memiliki tanggung jawab dalam mengawasi kinerja Walikota dan Wakil Walikota dalam menjalankan pemerintahan.

Seiring berjalannya waktu, DPRD Kota Probolinggo terus berupaya meningkatkan kinerjanya dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada

masyarakat. Mereka berharap dapat memajukan Kota Probolinggo dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pengawasan, dukungan, dan partisipasi aktif masyarakat.

DPRD Kota Probolinggo merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjalankan pemerintahan kota, mewakili suara masyarakat, dan memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Logo dprd kota probolinggo



1. Ukuran mantel: 28 x 36 cm
2. Bentuk lambang: perisai.

Penjelasan di atas mengenai elemen dan arti dari lambang Kota Probolinggo. Simbol-simbol yang terkandung dalam lambang tersebut memiliki

makna yang mendalam. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai elemen dan arti dari lambang Kota Probolinggo:

1. Lingkaran dan Teks "KOTA PROBOLINGGO": Lingkaran melambangkan kesatuan dan kelengkapan, sedangkan teks "KOTA PROBOLINGGO" menunjukkan identitas kota yang bersangkutan.
2. Warna Dasar Putih: Melambangkan kemurnian, kejujuran, serta keinginan untuk mencapai kehidupan yang bersih dan bermartabat.
3. Warna Dasar Biru Muda: Melambangkan kota Probolinggo sebagai daerah pesisir, yang memiliki hubungan erat dengan laut.
4. Bintang yang Bersinar dengan Sinar Keemasan: Bintang melambangkan harapan, kemuliaan, dan kejayaan. Sinar keemasan menggambarkan kemegahan dan keberanian dalam perjuangan.
5. Hiasan Daun Rambat dan Daun Mangga: Daun rambat dan daun mangga melambangkan keindahan, kesuburan, dan kekayaan alam Kota Probolinggo. Daerah ini terkenal sebagai penghasil anggur dan mangga yang terkenal di Indonesia.
6. Arti Bintang: Bintang dalam lambang mengacu pada cerita kuno tentang jatuhnya benda bercahaya (meteor) di wilayah Probolinggo. Tempat jatuhnya benda tersebut dipilih oleh raja sebagai tempat untuk mencapai kedamaian dan tujuan perjuangan. Dalam bahasa Sansekerta,

PROBO berarti cahaya dan LINGGA berarti tanda atau simbol, yang mengandung makna perdamaian.

Lambang ini mencerminkan harapan bahwa warga Kota Probolinggo senantiasa berada dalam cahaya kebenaran, dengan pikiran dan tindakan yang mengarah pada terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera, sesuai dengan cita-cita yang tertuang dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Melalui lambang ini, Kota Probolinggo menggambarkan identitas dan karakternya sebagai daerah pesisir yang subur dan memiliki keindahan alam yang kaya.

ii) PKB

- 2) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan pada tahun 1998 sebagai aspirasi dari warga Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. PKB berdiri dengan landasan kejuangan, keterbukaan, kebangsaan, dan demokratis. Meskipun NU sebagai organisasi tidak mendirikan partai politik, PKB dibentuk untuk menampung aspirasi warga NU dan juga terbuka bagi masyarakat Indonesia secara umum.
- 3) PKB mengusung nilai-nilai demokratis dan nasionalisme, serta menjunjung tinggi Pancasila dalam setiap usahanya. Partai ini juga menganut prinsip multikulturalisme dan mengembangkan hubungan persaudaraan melalui ikatan keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. PKB memiliki corak perjuangan yang santun dan akhlakul karimah, serta melestarikan tradisi baik dan mempelajari tradisi baru yang baik pula.



- 4) Partai ini merupakan partai yang terbuka bagi berbagai suku, agama, ras, dan golongan masyarakat. PKB memiliki visi, misi, bentuk perjuangan, keanggotaan, dan kepemimpinan yang mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat.
- 5) PKB juga memiliki komitmen dalam mempromosikan Islam Nusantara sebagai solusi dalam mengatasi konflik dan tragedi kemanusiaan yang terjadi atas nama agama. Partai ini mendukung multikulturalisme di Indonesia dan berperan dalam menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI.
- 6) Misi PKB meliputi bidang ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan. PKB berupaya mewujudkan kehidupan ekonomi yang adil dan demokratis, negara hukum yang beradab, budaya yang maju dan modern, pendidikan berkualitas, serta kesadaran terhadap pertahanan negara.
- 7) Dengan visi dan misi yang dimiliki, PKB memiliki komitmen untuk menjaga keutuhan dan kemajuan Indonesia dalam kerangka keadilan, demokrasi, keberagaman, dan kebangsaan.

Logo PKB



Lambang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terdiri dari beberapa elemen yang memiliki makna simbolis:

1. Bola Dunia dan Peta Indonesia: Melambangkan tanah air Indonesia sebagai basis perjuangan partai dalam mencapai tujuan partai.
2. Sembilan Bintang: Mewakili sembilan nilai idealisme partai, yaitu kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan.

3. Tulisan Nama Partai dan Singkatannya: Merupakan identitas diri partai dan sarana perjuangan aspirasi politik rakyat Indonesia untuk menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang demokratis.
4. Bingkai Segi Empat dengan Garis Ganda: Menunjukkan garis perjuangan partai yang menempatkan orientasi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, lahir dan batin secara sejajar.

Arti warna pada lambang PKB adalah sebagai berikut:

1. Putih: Melambangkan kesucian, ketulusan, dan kebenaran yang menjadi etos perjuangan partai.
2. Hijau: Melambangkan kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi tujuan perjuangan partai.
3. Kuning: Melambangkan kebangkitan bangsa dan pembaharuan yang berpijak pada kemaslahatan umat manusia.

PKB memiliki asas dan prinsip perjuangan yang menjadi landasan partai. Asas perjuangan PKB adalah berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip perjuangan PKB adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan,

menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan, dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Waljama'ah.

iii). PDI-P

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki sejarah sebagai pecahan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari beberapa partai politik pada tahun 1973. PDI sendiri terbentuk dari Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Sukarno pada tahun 1927, dan kemudian bergabung dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik.

Selama dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, PDIP telah mencapai kesuksesan dalam Pemilihan Umum dengan meraih suara dominan dan mendominasi kursi di parlemen. Pada Pemilu 2014, PDIP berhasil mengumpulkan 109 kursi di DPR RI, atau sekitar 19,5 persen dari total kursi parlemen. Kemudian, dalam Pemilu 2019, PDIP kembali menguasai parlemen dengan menduduki 128 kursi, atau sekitar 19,33 persen dari total kursi parlemen. Untuk Pemilu 2024, PDIP telah memperoleh nomor urut tiga.

Hal ini menunjukkan bahwa PDIP memiliki basis dukungan yang kuat dari masyarakat dan berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu partai politik yang signifikan di Indonesia.

### Visi dan Misi PDI Perjuangan:

#### Visi:

1. Menjadi alat perjuangan untuk membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945.
2. Menjadi alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Trisila).
3. Menjadi alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Eka Sila).
4. Menjadi wadah komunikasi politik untuk mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara.
5. Menjadi wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, memiliki pemahaman, kemampuan untuk menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Misi:

1. Memperjuangkan kepentingan rakyat dan menegakkan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.

2. Memperjuangkan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mempertahankan ideologi Pancasila dan UUD 1945.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat.
4. Memperjuangkan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat dalam bingkai hukum yang berlaku.
5. Meningkatkan peran dan partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
6. Mendorong pembangunan daerah dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
7. Memperkuat demokrasi dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
8. Mengembangkan sistem pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan SDM yang unggul.
9. Memperjuangkan keberagaman dan menghormati hak-hak minoritas dalam masyarakat.
10. Memperjuangkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan untuk generasi masa depan.

Visi dan misi PDI Perjuangan mencerminkan komitmen partai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, menjaga keutuhan negara, mendorong pembangunan ekonomi, memperjuangkan hak asasi manusia, meningkatkan peran perempuan, membangun daerah, memperkuat demokrasi, meningkatkan pendidikan, menghormati keberagaman, dan menjaga lingkungan.

PDIP mempunyai 4 pasal yang menjelaskan perihal misi partai. Berikut merupakan misi PDIP:

1. Pasal 7: Tujuan umum PDIP adalah mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. PDIP juga berjuang untuk mewujudkan Indonesia sejahtera yang berkeadilan sosial, mandiri secara politik dan ekonomi, serta memiliki kepribadian dalam kebudayaan.
2. Pasal 8: Tujuan khusus PDIP meliputi membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mencapai kesejahteraan berkeadilan sosial, mengembangkan semangat, mengkonsolidasi kemauan, dan mengorganisir tindakan serta kekuatan rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi. PDIP juga berperjuangan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, PDIP juga

menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan semangat Dasa Sila Bandung.

3. Pasal 9: Fungsi PDIP meliputi mendidik dan mencerdaskan rakyat dalam menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, merekrut anggota dan kader partai untuk ditugaskan dalam struktur partai, lembaga politik, dan lembaga publik, membentuk kader partai yang memiliki jiwa pelopor dan mampu menjalankan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan, menghimpun dan membangun kekuatan rakyat untuk mencapai cita-cita masyarakat Pancasila, serta membangun komunikasi politik berdasarkan hakikat dasar kehidupan berpolitik dan partisipasi politik warga negara.
4. Pasal 10: Tugas PDIP meliputi mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, dan tujuan berbangsa dan bernegara, menjalankan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik partai. PDIP juga mempersiapkan kader partai sebagai petugas partai dalam jabatan politik dan publik, mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara berdasarkan ideologi



Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih, dan berwibawa. Sebagai poros kekuatan politik nasional, PDIP juga berperan aktif dalam membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa berdasarkan semangat Dasasila Bandung sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

Logo partai Pdi-P



Lambang PDIP memiliki beberapa elemen yang memiliki makna sebagai berikut:

1. Banteng dengan tanduk yang kekar melambangkan kekuatan rakyat dan kesungguhan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Banteng sering kali diidentifikasi sebagai simbol kekuatan dan keberanian.
2. Warna dasar merah melambangkan keberanian dan ketegasan dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi rakyat. Merah juga sering dikaitkan dengan semangat, keberanian, dan perjuangan.
3. Mata merah dengan pandangan tajam melambangkan kewaspadaan yang tinggi dan kecerdasan dalam menghadapi ancaman dan tantangan yang mungkin timbul dalam perjuangan. Mata yang tajam mencerminkan kecerdasan, kepekaan, dan kesiapan dalam melihat situasi.
4. Moncong putih melambangkan kepercayaan dan komitmen dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Warna putih sering dikaitkan dengan kebersihan, kesucian, dan integritas.
5. Lingkaran merah melambangkan tekad yang bulat dan perjuangan yang terus-menerus tanpa henti. Lingkaran sering digunakan sebagai simbol kesatuan, kelengkapan, dan keberlanjutan.

Melalui lambang ini, PDIP ingin menggambarkan komitmen mereka dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dengan kekuatan, keberanian, ketegasan, kewaspadaan, kepercayaan, komitmen, tekad, dan perjuangan yang berkelanjutan.

#### iiii). GOLKAR

Partai Golkar adalah hasil dari gagasan Soekarno, Soepomo, dan Ki Hadjar Dewantara pada tahun 1940. Awalnya, Golkar berfungsi sebagai golongan fungsional sebagai penyeimbang partai politik, namun kemudian berubah menjadi partai politik pada saat Bung Karno dan Jenderal Abdul Haris Nasution memutuskan untuk melawan PKI.

Golkar mendapatkan dukungan yang kuat di masa Orde Baru, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada Pemilu 3 Juli 1971, Golkar memperoleh suara terbanyak dan mendominasi parlemen dengan memperoleh 236 dari 360 kursi anggota DPR.

Golkar memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman, berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Misi Partai Golkar mencakup upaya mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pembangunan nasional di berbagai bidang, menegakkan supremasi hukum dan menghormati hak asasi manusia, serta menciptakan pemerintahan yang efektif, baik, berwibawa, dan demokratis.

Dengan demikian, Partai Golkar bertujuan untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang demokratis, sejahtera, berdaulat, dan berkeadilan sosial, serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Logo partai golkar



1. Makna Lambang Golkar, Salah Satu Partai Tua Yang Sudah Terbentuk Sejak 1964.
2. Pohon beringin melambangkan partai yang memberikan perlindungan pada rakyat Indonesia
3. Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia

4. Perisai bersegi 5 melambangkan ideologi atas dasar partai Golkar yakni Pancasila.
5. Bunga kapas berjumlah 17, Akar bergantung di pohon beringin berjumlah 8 dan 45 butir padi melambangkan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945.
6. Warna Putih melambangkan kesucian
7. Warna Kuning melambangkan kejayaan

#### **B. Penyajian Data Fokus Penelitian**

Dalam proses pengumpulan data, semua data yang diperoleh dari hasil yang digunakan seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya akan dianalisis. data yang diperoleh melalui observasi, wawancara atau interaksi akan disajikan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan tetap mencerminkan keprihatinan penelitian ini.

Penelitian berlokasi di DPRD Kota Probolinggo dengan fokus tiga partai yakni PKB, PDI-P dan GOLKAR sebagai 3 besar partai yang menduduki posisi penting di daerah kota probolinggo dan terbilang memiliki elektabilitas serta tingkat kepercayaan dari masyarakat yang cukup tinggi. Kemudian di fokuskan kembali dengan dilakukan wawancara terhadap kader perempuan tiap partai yang menduduki kursi legislative di kota probolinggo sebagai pelaku atau orang orang yang berperan dan mengetahui seluk beluk pengimplementasian keterwakilan

perempuan pada tiap partai. Setelah dilakukan wawancara selanjutnya dilakukan analisis tentang implementasi keterwakilan perempuan dalam partai sesuai dengan teori serta indikator indikator yang telah dijabarkan diatas agar penelitian dapat disajikan secara sistematis.

#### **a) Partai politik**

Partai politik lahir di negara-negara Eropa Barat. Partai politik lahir dari kehendak bebas ketika menyebar gagasan bahwa rakyat adalah unsur yang harus diikutsertakan dalam proses politik. Oleh karena itu, partai politik berkembang sebagai penghubung atau jembatan antara masyarakat di satu pihak dengan pemerintah di pihak lain. Oleh karena itu, partai politik berkembang sebagai penghubung atau jembatan antara masyarakat di satu pihak dengan pemerintah di pihak lain.

Di negara-negara yang menganut demokrasi, gagasan partisipasi rakyat memiliki landasan ideologis bahwa rakyat berhak memutuskan siapa yang berkuasa dan berhak memutuskan kebijakan publik.

sementara itu narasumber penelitian yang berasal dari fraksi Golkar ibu farina menyampaikan pandangannya terkait partai politik saat ditanyai terkait apa definisi sesungguhnya dari partai politik baginya.

“ bagi saya partai politik bukan hanya sekedar wadah dan penyalur aspirasi tapi lebih dari itu partai politik merupakan perwakilan atau bahkan

cerminan bagi masyarakat, lalu orang-orang di dalamnya merupakan penyambung lidah rakyat”(wawancara tanggal 9 maret di kantor DPRD Kota Probolinggo ruang fraksi Golkar)

Sementara Masda yang juga merupakan perwakilan perempuan dalam kursi legislatif Partai Golkar menyampaikan pendapatnya terkait makna atau definisi partai politik baginya

“partai politik merupakan jembatan, wadah atau tempat yang menampung serta kemudian menjembatani segala aspirasi masyarakat, mewakili suara-suara rakyat dan tentunya juga merupakan sarana yang tepat untuk berpartisipasi dalam politik”(wawancara tanggal 15 maret via seluler)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bagi para perempuan yang terpilih dan sudah terjun dalam politik, partai politik merupakan tempat menyalurkan aspirasi bagi masyarakat serta tempat bagi mereka untuk berpolitik.

Sementara bagi peneliti partai politik merupakan sebuah organisasi yang terorganisir dimana di dalamnya terdapat anggota atau yang selanjutnya disebut sebagai kader dengan tujuan yang sama dalam mencapai tujuan politik serta mempertahankan kekuatan serta kekuasaan politik yang telah dibangun sebelumnya oleh partai.

## **b) Kesetaraan gender**

Untuk menjelaskan terkait kesetaraan gender, ada beberapa teori yang dapat digunakan Menurut (sasongko, 2009) yakni teori nature, nurture dan teori equalibirium

### 1. Teori nature

Perbedaan gender itu wajar dan harus diterima. Perbedaan biologis ini memberi kita tanda dan gejala perbedaan dalam perilaku dan fungsi kedua jenis kelamin. Merujuk dari konsep teori nature narasumber peneliti ibu farina mengatakan

“ yang pada hakikatnya memang berbeda laki laki dan perempuan, tapi dalam dunia politik hal ini seharusnya tidak berlaku dan tidak semestinya di telan mentah mentah”

Menanggapi pertanyaan yang serupa, masda amelia sebagai narasumber yang merupakan perwakilan perempuan dalam fraksi golkar memberikan uraian jawaban

“ perbedaan secara fisik dan satu dua hal lain memang benar adanya, tapi bagi saya hal ini tidak bisa diterapkan dalam politik, tidak bisa dengan sangat kaku laki laki di sektor ini perempuan di sektor ini seperti itu”

Kemudian peneliti menyimpulkan hasil wawancara pertanyaan diatas adalah bahwa kedua narasumber sepakat bahwa perbedaan memang ada tetapi tidak dapat dimaknai dan diterapkan secara saklek atau kaku dalam dunia politik.



Peneliti sendiri meyakini bahwa laki laki dan perempuan memiliki porsinya masing masing tetapi dalam hal politik hal ini kemudian menjadi hilang karna laki laki dan perempuan menjadi fleksibel dan harusnya tidak mengenal gender.

## 2. Teori nurture

Teori ini menyatakan bahwa perbedaan antara anak perempuan dan laki-laki muncul karena struktur sosial dan budaya. Konsekuensi Diskriminasi Peran dan Peran Diskriminasi ini seringkali mengakibatkan pengucilan dan pengucilan perempuan dari peran dan partisipasinya dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara dan bangsa.

Menyelaraskan pertanyaan dengan teori ini maka berikut adalah jawaban dari narasumber ibu farina yang berasal dari fraksi golkar

“memang benar, saat ini perempuan selalu diberatkan atas struktur sosial, seringkali perempuan menjadi serba salah dalam menghadapi masyarakat yang cenderung memihak pada laki laki, baik itu berasal dari masyarakat laki laki itu sendiri atau bahkan muncul dari kaum perempuan itu sendiri”

Menganggapi pertanyaan serupa terkait perempuan dan kesenjangan struktur sosial yang di dapat dalam politik, masda amelia memberikan jawaban hampir serupa dengan ibu farina yakni

“kesenjangan dalam struktur sosial harusnya benar benar menjadi permasalahan yang harus dihadapi secara serius, hal ini saya rasa sangat

sangat menghambat bagi kaum perempuan untuk berkembang, tidak dapat kita naifkan bahwa memang masyarakat kita masih menganggap bahwa laki laki lebih superior dari perempuan, meskipun pada kenyataannya hal ini tidak benar”

Dari kedua jawaban diatas penulis menyimpulkan bahwa kedua narasumber sama tidak setuju dengan adanya kesenjangan struktur sosial yang dirasakan kaum perempuan, hal ini mereka yakini sebagai penghambat kaum perempuan untuk maju.

Penulis pun memiliki pandangan yang serupa saat kesenjangan struktur sosial antara perempuan dan laki laki masih tinggi maka penulis meyakini selamanya perempuan tidak akan dapat menyetarai laki laki apabila hal ini tidak di hapuskan atau di minimalisirkan.

### 3. Teori equalibirium

Teori ini menekankan konsep kerjasama dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Sikap ini tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan bersama-sama dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa.

Pada teori ini penulis kemudian mempertanyakan bagaimana kesetaraan atau bagaimana seharusnya keseimbangan antara laki laki dan perempuan dalam politik menurut para narasumber, yang kemudian ditanggapi oleh ibu Farina dengan jawaban berikut

“kesetaraan bagi saya bukan berarti laki laki menyaingi perempuan atau perempuan menyaingi laki laki, tapi bagaimana kedua makhluk yang diciptakan tuhan dengan kemampuannya masing masing ini dapat bekerja sama dan bersinergi dalam memajukan bangsa, dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.”

Menanggapi hal yang serupa masda amelia memberikan jawabannya yakni

“sinergi atau kekompakan keselarasan visi misi dan beberapak faktor lainnya merupakan hal yang harus terpenuhi terlebih dahulu untuk mendapatkan keseimbangan dalam politik, bukan pembagian wilayah kerja akan tetapi penempatan sesuai kemampuan bukan sesuai gender, itu yang saya kira sebagai kesetaraan, hal hal yang tidak jomplang atau berat sebelah kepada salah satunya”

Dari hasil wawancara ini penulis menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan keseimbangan dan kesetaraan maka diperlukan sinergi antara kaum laki laki dan perempuan dalam berpolitik kemduaia juga penempatan kerja yang sesuai dengan kemampuan akan menghasilkan kesetaraan yang tidak berat sebelah atau cenderung memihak salah satunya.

Bagi penulis sendiri kesetaraan bukan berarti rasa superior atau rasa lebih unggul dari salah satu, akan tetapi keselarasan, keseimbangan, kesesuaian kemampuan antar tiap individunya.

### **c) Partisipasi politik perempuan**

Partisipasi merupakan aspek terpenting dari demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi. Tanpa intervensi, kebijakan pemerintah gagal memberikan rasa keadilan bagi warganya.

Peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik ada dan semakin berkurang, namun dihilangkan karena berbagai alasan. Lebih penting lagi, dunia politik adalah dunia masyarakat, dunia kekayaan, dunia akal, dunia kebijaksanaan, dunia kebijaksanaan. , semuanya mengenakan pakaian pria dan wanita. Perempuan adalah "koki", pemikir yang kurang kritis, tidak takut resiko dan semua konservatif terhadap perempuan, sehingga mereka tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik. Dengan demikian, ruang publik untuk laki-laki dan dunia domestik untuk perempuan.

Saat ditanyai terkait partisipasi politik perempuan dalam partai narasumber ibu Farina menjawab sebagai berikut

“kehadiran perempuan merupakan hal yang penting, suara perempuan harus diperhitungkan dan aspirasi aspirasinya sama wajib di dengarkan, perempuan dapat bergabung bersama dengan laki laki untuk berpolitik, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa perempuan sering terhambat karna masalah kesenjangan struktur sosial tadi maka itu menjadi PR besar bagi kita untuk menuntaskan permasalahan tersebut”

Mengulang pertanyaan yang sama terhadap Masda Amelia, Masda Amelia menyampaikan pandangannya terkait partisipasi politik perempuan

“pada dasarnya siapa saja yang telah menjadi warga negara dan memiliki hak untuk berpartisipasi sesuai dengan ketentuan maka partisipasinya tidak dapat kita entengakan, semua partisipasi baik dari laki laki maupun perempuan sama pentingnya, partisipasi politik perempuan tidak dapat diabaikan bahkan tidak dapat dihilangkan, maka sudah menjadi kewajiban untuk perempuan berpartisipasi dalam politik, apabila telah wajib maka masyarakat mau tidak mau harus di paksa untuk memberikan ruang politik terhadap perempuan”

Dari jawaban narasumber diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi politik perempuan merupakan sebuah keharusan dalam demokrasi indonesia, karna itu merupakan hak bagia setiap warga negara dan siapa pun tidak boleh untuk menghilangkannya.

Penulis meyakini bahwa tanpa adanya salah satu partisipasi baik laki laki maupun perempuan maka demokrasi indonesia akan cacat, karna sejatinya demokrasi sendiri memberikan siapa pun kebebasan dengan batasan batasan tertentu yang sama dan seimbang tanpa pandang bulu.

meskipun ada ketentuan hukum yang mengaturnya, hak-hak perempuan belum terpenuhi dengan baik oleh negara yang seharusnya menjadi negara demokrasi,

Berikut beberapa aturan yang bisa menjadi acuan hukum bagi Anda para wanita dalam menuntut dan melindungi hak-haknya.

Larangan diskriminasi dalam UUD 1945

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Manusia

UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik UU No 2 Tahun 2008

Dari beberapa peraturan diatas, penulis memberikan pertanyaan kepada narasumber berupa pandangan mereka terhadap regulasi yang ada untuk perlindungan hak politik perempuan dari pertanyaan tersebut kemudfian muncul jawaban dari para narasumber sebagai berikut

Bu farina selaku anggota dewan perwakilan rakyat kota probolinggo memberikan jawabannya saat ditanya terkait pertanyaan diatas dengan

“saya pribadi sangat setuju, mendukung dan berharap dengan adanya regulasi regulasi yang tadi telah disebutkan nantinya akan dapat membantu kaum perempuan untuk meningkatkan partisipasinya terjuan di dalam dunia politik, segala regulasi yang melindungi harkat dan martabat perempuan saya akan mendukungnya”

Masda amelia saat diwawancarai via telepon seluler dengan pertanyaan serupa memberikan jawabannya

“regulasi regulasi perlindungan hak perempuan apapun itu sudah pasti saya mendukung dan mengapresiasinya, regulasi tersebut harus kita kawal bersama agar sesuai dalam implemenasiannya. Regulasi ini memang merupakan hal yang penting yang dapat menjadi payung hukum bagi perempuan perempuan yang ingin berpolitik”

Menarik kesimpulan dari kedua narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa kedua narasumber mendukung penuh bahkan mengajak semua elemen masyarakat untuk turut serta mengawal regulasi regulasi perlindungan hak perempuan terutama yang dapat menjadi payung hukum bagi perempuan yang berpartisipasi dalam politik.

Menyambung terkait pertanyaan sebelumnya terkait pandangan narasumber terkait regulasi perlindungan hak perempuan, maka selanjutnya pembahasan terakhir atau pertanyaan terakhir adalah pengimplementasian regulasi pada partai sendiri, khusus pertanyaan terakhir peneliti memperluas narasumber menjadi bukan hanya pada kader perempuan yang menjabat di legislative tetapi juga kepada kader partai, dalam hal ini berarti kader partai PKB,PDI-P dan GOLKAR.

Pada partai pkb, diwakili oleh abdul mujib memberikan jawaban yang lugas saat ditanyai terkait penerapan regulasi yang mengawal partisipasi politik perempuan dalam tubuh partainya.

“ kalau ditanya terlaksana atau tidak, saya kira ini sudah terlaksana dalam tubuh partai, mungkin berbeda lagi kalau yang ditanya pada saat

perolehan kursi, bagaimanapun telah kita usahakan untuk memenuhi partisipasi politik perempuan dalam tubuh partai kita”

Menyambung pertanyaan yang sama dengan narasumber dari partai PKB machfud sahal, ibu titin andriani yang mewakili partai PDI-P memberikan jawabannya, ibu titin andriani ini sendiri merupakan seorang mantan dewan perwakilan rakyat fraksi PDI-P periode sebelumnya

“sudah, pengimplementasiannya tentu sudah dilakukan terlebih dahulu di tubuh partai kita, kalau mau melihat jumlah pengurus cabang pun sudah memenuhi 30% kuota perempuan, PDI-P selalu berusaha mewakilkan suara tiap tiap perempuan diluar sana, maka sudah jelas dan pasti kami menekankan pada pemenuhan partisipasi politik perempuan dalam tubuh partai kita “

Kemudian pada partai golkar yang diwakili oleh ibu farina juga menekankan hal yang kurang lebih sama dengan kedua partai sebelumnya.

“ pada partai golkar pengimplementasian keterwakilan partisipasi politik perempuan tentu sudah diusahakan dan dimaksimalkan, keterwakilan perempuan di dalam tubuh partai kami merupakan sebuah kewajiban, mengingat demokrasi kita bukan hanya milik laki laki, tapi perempuan pun sama ber haknya juga”

Merangkum kembali jawaban dari narasumber partai PKB, PDI-P dan GOLKAR peneliti menyimpulkan bahwa sesungguhnya keterwakilan perempuan dalam tubuh ketiga partai telah di implementasikan sebagaimana mestinya terlepas dari opini opini perempuan digunakan sebagai alat



pelengkap demokrasi saja, akan tetapi ketiga partai telah serius dalam menerapkan, mengimplementasikan regulasi terkait perlindungan hak politik perempuan.

dengan demikian dapat berarti juga bahwa Seiring berjalannya waktu, keterwakilan politik perempuan di partai politik telah terpenuhi dengan baik. Dalam beberapa dekade terakhir, langkah-langkah besar telah diambil untuk memastikan bahwa perempuan memiliki suara yang lebih kuat dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan politik.

Salah satu tanda kemajuan yang signifikan adalah peningkatan jumlah perempuan yang terlibat dalam partai politik. Partai-partai kini secara aktif mencari dan mendorong perempuan untuk bergabung dan berpartisipasi dalam proses politik. Mereka menawarkan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum, dan para perempuan semakin merasa didorong dan didukung untuk mengambil peran aktif dalam politik.

Selain peningkatan jumlah, perempuan juga memegang posisi-posisi penting dalam partai politik. Banyak perempuan yang menduduki jabatan kepemimpinan tinggi, termasuk sebagai ketua partai atau anggota parlemen. Keberadaan perempuan di posisi-posisi strategis ini berarti bahwa suara dan perspektif mereka diakui dan dipertimbangkan secara serius dalam pembuatan kebijakan partai.

Selain itu, berbagai kebijakan dan program telah diterapkan untuk memastikan keterwakilan politik perempuan yang lebih baik. Misalnya, partai-

partai telah memperkenalkan kuota perempuan, yang memastikan bahwa sejumlah kursi diisi oleh perempuan. Hal ini membantu mengatasi ketidakseimbangan gender yang ada sebelumnya dan mendorong partisipasi perempuan yang lebih luas dalam politik.

Lebih penting lagi, dampak dari keterwakilan politik perempuan telah terlihat dalam kebijakan publik yang dihasilkan. Keberagaman perspektif yang dibawa oleh perempuan membawa keberagaman masalah dan kepentingan dalam pembuatan kebijakan, sehingga mendorong keputusan yang lebih holistik dan inklusif. Dengan melibatkan perempuan dalam proses politik, partai-partai mampu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat dengan lebih baik.

Meskipun ada kemajuan yang signifikan, tetap ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keterwakilan politik perempuan yang lebih baik. Diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mempromosikan kesetaraan gender di semua tingkatan politik, menghilangkan hambatan dan diskriminasi yang masih ada, serta memastikan akses yang adil dan kesempatan yang sama bagi semua individu yang ingin terlibat dalam politik.

Dalam kesimpulannya, keterwakilan politik perempuan di partai telah mengalami perkembangan positif. Melalui langkah-langkah yang diambil, perempuan sekarang memiliki suara yang lebih kuat dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan politik. Keberagaman perspektif dan kepentingan yang dibawa oleh perempuan telah memperkaya politik dan

mendorong keputusan yang lebih inklusif. Namun, masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa keterwakilan politik perempuan terus meningkat dan menjadi norma di seluruh partai politik.